

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional (*International Relations*) yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan (Sitepu. 2011: 20).

Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu” (Perwita dan Yani. 2011:4). Steven Chan, mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi antara aktor-aktor yang tindakan-tindakannya atau kondisi-kondisinya memiliki konsekuensi akibat yang penting bagi pihak-pihak lain di luar yuridiksi efektif unit politik (negara) mereka, dengan definisi seperti itu perlu memperluas dan menjelaskan beberapa istilah kunci. Pertama, istilah interaksi mengimplementasikan pengaruh yang bersifat mutul dan resiprokal. Paling tidak diperlukan dua pihak atau unit sebelum adanya suatu hubungan, sehingga studi hubungan internasional berkenaan dengan cara-cara dimana tindakan atau dipengaruhi pihak lain. Kedua, yaitu hindari penggunaan nations (bangsa) yang perlu diperhatikan adalah tidak semua pemain yang terlibat

dalam politik dunia atau ekonomi internasional merepresentasikan bangsa-bangsa atau negara. Bisa saja organisasi internasional dan tindakan serta pandangan mereka memiliki pengaruh diluar negeri. Ketiga, perbedaan antara interaksi domestik dan internasional lebih di tingkatkan terhadap dampak yang ditimbulkannya dibanding pada dikatomi dalam sampai luar negeri. Jika kondisi atau tindakan suatu aktor memiliki dampak yang paling di luar batas-batas yurisdiksi unit politik (negara), maka hal tersebut dimasukkan dalam hubungan internasional. Keempat, aktor-aktor dalam pendefinisikan hubungan internasional di atas hanya memasukkan aktor-aktor yang penting. Hanya saja, derajat pentingnya aktor-aktor tersebut bervariasi sesuai isu-isu keadaan yang terjadi (Ambarwati dan Subarno, 2016: 5-6).

Hubungan internasional juga merupakan interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh para aktor di panggung internasional, melintas batas-batas kedaulatan negara. Aktor dalam hubungan internasional mencakup aktor negara dan bukan negara. Adapun dalam hubungan internasional sendiri terdapat beberapa konsep umum, adalah sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh yang didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional terdapat berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis sistem, dimana dalam hubungan internasional berpandangan bahwa fenomena yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani. 2011: 29-34).

Hubungan Internasional mencakup segala macam hubungan antara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, dan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dari manusia (Darmayadi. 2015:23).

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup semua hubungan antar negara, misal saja pendapat dari Schwarenberger yang menyatakan bahwa ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Dimana dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur-unsur politik

saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya (Schwarenberger dalam Perwita & Yani. 2011: 1).

Sedangkan Mc.Clelland mendefinisikan bahwa hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antar jenis- jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mc.Clelland dalam Perwita & Yani. 2011: 4).

Nicholas J. Spykman mengartikan bahwa hubungan internasional adalah bahwa *international relations* yang dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya saling memiliki perbedaan-perbedaan seperti misalnya, komunikasi internasional, transaksi perdagangan internasional, pertandingan atletik internasional, pariwisata, konferensi-konferensi internasional dan sebagainya. Dapat didefenisikan pula bahwa *international relations* yang dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya saling memiliki perbedaan-perbedaan seperti misalnya, komunikasi internasional, transaksi perdagangan internasional, pertandingan atletik internasional, pariwisata, konferensi-konferensi internasional dan sebagainya (Sitepu. 2011: 29).

Berbeda dengan masa lalu, dimana pada masa lalu Hubungan Internasional berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai serta kemudia mengalami perkembangan dan meluas dalam mempelajari terkait perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan internasional kontemporer selain tidak hanya memfokuskan pada perhatian dan

kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkungannya melintas batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*). Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy. 2002: 1-2).

Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya” (Jackson dan Sorensen. 2014: 34).

2.1.2 Hubungan Bilateral

Dalam menjalin hubungan antar bangsa dan bernegara pasti dan wajib negara-negara melakukan interaksi dan menjalin hubungan baik dalam hubungan bilateral, regional, maupun multilateral dan tidak mungkin suatu negara dapat berdiri sendiri dalam membangun negaranya tanpa bantuan dalam hal sosial, ekonomi dari negara lain (Rudy. 2002: 127). Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan

hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama di bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan hidup. Hubungan bilateral mengacu kepada hubungan politik, ekonomi maupun budaya yang melibatkan dua negara. Hingga saat ini kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral. (Djelantik. 2008: 85)

Sedangkan dalam definisi lain digambarkan bahwa hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dalam proses Hubungan bilateral ditentukan tiga motif, yaitu Memelihara kepentingan nasional, Memelihara perdamaian dan Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani. 2011: 28-29).

2.1.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan studi manajemen hubungan eksternal dengan aktivitas – aktivitas negara bangsa seperti yang berbeda dengan kebijakan dalam

negeri. Politik luar negeri melibatkan cita – cita, strategi, tindakan, metode, panduan dan arahan oleh pemerintah nasional yang saling melakukan interaksi/hubungan internasional dengan aktor – aktor lain (organisasi internasional, LSM, perusahaan, dll) (Jackson dan Sorensen, 2013: 439).

Politik luar negeri mencakup segala tindakan diatas yang bersifat kooperatif maupun kompetitif yang dilakukan oleh sebuah negara dalam hubungan internasional. Semua negara di dunia diwajibkan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri terhadap negara – negara lain dan aktor – aktor internasional. Umumnya para pembuat kebijakan luar negeri yang utama adalah pejabat pemerintah (presiden, perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, dsb). Para pembuat kebijakan tersebut cenderung melibatkan alat – tujuan dan biaya – analisis manfaat dengan cara – cara yang telah disusun untuk mencapai kepentingannya (Jackson dan Sorensen, 2013:536).

Keohane dan Nye menggambarkan bagaimana revolusi informasi secara dramatis merubah pola hubungan internasional, yang mereka konsepskan sebelumnya, “*complex interdependence*”. Konsep ini merupakan gambaran dunia yang tidak lagi didominasi oleh hubungan keamanan dan militer. Negara terhubung satu sama lain melalui hubungan sosial dan politik. Revolusi informasi telah memperluas relasi transnasional secara cepat. Aktor non pemerintah memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk mengatur dan mempropaganda pandangan-pandangannya. Akibatnya para pemimpin politik

menjadi lebih sulit untuk memelihara kohesivitas dalam isu politik luar negeri (Triwahyuni, dan Yani, 2018:6).

Kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dalam negeri (internal) dan faktor luar negeri (eksternal). Bagaimanapun, politik luar negeri merupakan gambaran dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan oleh pemerintahnya di dunia internasional dalam upaya menentukan keterlibatan negara di dalam kancah politik internasional.

1. Faktor Internal

Faktor dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri beberapa diantaranya yaitu sistem pemerintahan, keadaan wilayah, tujuan nasional negara, ideologi bangsa, sumber daya alam, bahkan jumlah penduduk. Di samping itu, seringkali terjadi pergantian pemimpin negara juga mempengaruhi kebijakan politik luar negeri.

2. Faktor Eksternal

Faktor luar negeri juga sangat berpengaruh kuat terhadap penyusunan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Pergaulan dunia, bagaimana sebuah negara melihat negara lain berdasarkan pada apa yang dimiliki oleh negara tersebut (faktor *tangible* dan *intangible power*, kualitas dan kemampuan diplomat negara).

Adapun keputusan-keputusan dalam politik luar negeri terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:

1. Keputusan yang bersifat pragmatis (terencana) adalah keputusan besar yang mempunyai konsekuensi dan tujuan jangka panjang; membuat studi lanjutan, pertimbangan dan evaluasi yang mendalam mengenai seluruh opsi alternatif.
2. Keputusan yang bersifat krisis adalah keputusan yang dibuat selama masa-masa terancam berat dan darurat; waktu untuk menanggapi terbatas, dan ada elemen mendadak yang membutuhkan respon yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Keputusan yang bersifat taktis adalah keputusan penting biasanya bersifat pragmatis; memerlukan revaluasi, revisi dan pembalikan (Coulombis & Wolfe, 2004:129).

2.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Setiap negara pasti memiliki hubungan dengan negara lain dalam menjalankan pemerintahannya. Oleh sebab itu kebijakan yang ada pada hubungan antarnegara sudah pasti mengandung substansi yang berorientasi dalam dan luar negeri. Berbagai ancaman dapat muncul dari internal dan eksternal, namun ancaman eksternal merupakan sebuah ancaman yang besar pula, ancaman besar tersebut muncul dari negara lain. Kebijakan luar negeri sendiri menyimpan dan memiliki cirinya sendiri yang dapat dikatakan sebagai sifat alami dari kebijakan luar negeri yaitu untuk menciptakan rasa aman dan kelangsungan hidup negara. Kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi atau rencana tindakan yang dibangun oleh para pembuat keputusan (*decision makers*) di dalam suatu negara terhadap

negara lain atau aktor di dalam politik internasional lainnya. Menurut Rosenau kebijakan luar negeri diusahakan untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan internasional (Rudy, 2002:27).

Inti dari mempelajari kebijakan luar negeri adalah untuk mengetahui dan memahami aksi dan perilaku dari suatu negara ke negara lainnya atau terhadap lingkungan internasional secara umum. Kebijakan luar negeri sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan dari kebijakan suatu negara dan interaksinya terhadap lingkungan di luar perbatasannya (Breuning, 2007:5). Dalam definisi lain, kebijakan luar negeri dimaknai sebagai seperangkat aksi atau aturan yang berasal dari otoritas politik independen dan ditujukan pada lingkungan internasional (Morin & Paquin, 2018:3).

Untuk memahami kebijakan luar negeri, Modelski menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri sebagai suatu sistem dimana keputusan dirumuskan dan direncanakan untuk dilaksanakan. Kemudian sistem kebijakan luar negeri tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembuat keputusan
2. Tujuan kebijakan luar negeri
3. Prinsip yang dianut
4. Kapabilitas untuk melaksanakannya
5. Di mana kebijakan tersebut di tempatkan (Dugis, 2008:102)

Di dalam kebijakan luar negeri, tertera di dalamnya adalah strategi, cita-cita, tindakan, metode, panduan, pemahaman, kesepakatan dan sebagainya yang dengan

semua hal itu pemerintah nasional melaksanakan hubungan internasionalnya. Dikatakan oleh Carlsnaes bahwa pemerintah ingin membuat pengaruh terhadap aktivitas aktor lain yang mana tidak dapat dikendalikan oleh mereka secara total karena berada diluar kedaulatan, maka dari itu kebijakan luar negeri dibutuhkan (Jackson & Sorensen, 2013:439).

Kebijakan luar negeri terkandung didalamnya fungsi-fungsi politik tertentu sebagai berikut :

1. Melindungi keamanan nasional, sebagai contoh dengan mengembangkan aspek militer dan bergabung ke dalam aliansi keamanan;
2. Menjaga dan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi. Sebagai contoh dengan membuka diri untuk investasi asing dan melakukan ekspor impor;
3. Mendorong pengembangan wilayah strategis melalui kerja sama internasional;
4. Mendukung martabat manusia (David, 2009:13).

Dilihat dari aspek tujuan kebijakan luar negeri, beberapa analisis hubungan internasional menganggap tujuan dari kebijakan luar negeri tersebut telah ditentukan sebelumnya secara umum. Tujuan-tujuan yang terkandung tersebut bersifat tanpa batas waktu, universal dan cocok untuk semua negara bagaimanapun kondisi negara tersebut. Analisis kebijakan luar negeri memandang bahwa apabila dilihat dari preferensi teori hubungan internasional maka kebijakan luar negeri memiliki tujuan untuk stabilitas sistem internasional, mengejar kesejahteraan,

meningkatkan kekuatan relatif dan pemeliharaan identitas nasional dari pemimpin yang sedang berkuasa di negara tersebut (Morin & Paquin, 2018:19). Sementara itu menurut Plano, setiap kebijakan luar negeri disiapkan untuk mencapai tujuan nasional yang mana tujuan nasional tersebut merupakan rumusan nyata dari kepentingan nasional dan dikaitkan dengan power negara tersebut dan situasi internasional saat itu (Perwita & Yani, 2017:51).

Kebijakan luar negeri tentu memiliki instrumen, alat atau cara untuk menyalurkannya, instrumen tersebut adalah *Socialization*, *Coercion*, *Intervention* dan *Event-Based Databases*.

1. *Socialization* (Sosialisasi)

Kategori pertama dari instrumen kebijakan luar negeri adalah sosialisasi yang mana didefinisikan sebagai pemindahan keyakinan, nilai-nilai dan ide-ide dari satu aktor ke aktor lainnya. Hal-hal tersebut tersebar dengan berbagai cara. Terkadang dengan cara komunikasi strategis dan juga aksi dalam bentuk diplomasi publik.

2. *Coercion* (Paksaan)

Langkah koersif dirancang untuk mempengaruhi keadaan target berperilaku. Salah satu cara dari langkah paksaan ini adalah dengan menerapkan ancaman dan sanksi terhadap aktor lain.

3. *Intervention* (Campur tangan)

Dilakukan terhadap urusan dalam negeri aktor lain dengan tujuan untuk membawa perubahan struktural internal. Terdapat dua bentuk intervensi dalam instrumen ini, yaitu intervensi politik dan intervensi militer.

4. *Event-Based Databases*

Event-Based Databases adalah sebuah integrasi dari ketiga instrumen kebijakan luar negeri sebelumnya, yang mana mana diimplementasikan secara bersamaan atau pun memilih mana yang paling baik diantaranya secara berdampingan, sebagai contoh menggunakan instrumen sosialisasi dan paksaan (Morin & Paquin, 2018:32-41).

2.1.5 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional (Perwita & Yani. 2005: 35).

Kepentingan nasional dalam hubungan antara kedua negara yang melakukan beberapa kerjasama yang menghasilkan kepentingan negaranya masing-masing, dimana konsep-konsep kepentingan nasional sangat penting terhadap hubungan internasional. Kepentinnan nasional tercipta karena dari kebutuhan suatu negara,

Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. kepentingan juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kaca mata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan nasional secara konseptual, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu. 2011: 163).

Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kebutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejahteraan dan ekonomi (Plano dan Olton. 1999: 7).

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani. 2005: 35).

Berbeda dengan Rudi yang menyatakan kepentingan nasional (*national interest*) sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional *relative* tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dari kebutuhan wilayahnya), serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy. 2002: 116).

Kepentingan ekonomi Tiongkok dalam kebijakan BRI ini adalah dengan melakukan berbagai kerjasama-kerjasama untuk menjalin hubungan negaranya dengan negara lain untuk menjamin akses pasar dan sumber dayanya guna semakin meningkatkan kekuatan ekonominya.

Walaupun kepentingan ekonomi merupakan kepentingan utama Tiongkok, Tiongkok juga memperhatikan kepentingan politiknya. Kepentingan politik sebuah negara merupakan ungkapan yang dipusatkan dari semua kepentingan nasional, dengan kedaulatan negara sebagai intinya. Kebijakan *Belt and Road Initiative* merupakan suatu cara untuk Tiongkok mencapai kepentingan politiknya. Melalui berbagai kerjasama dan investasi yang ada pada proyek pembangunan jalur sutra baru ini Tiongkok dinilai akan mampu mempererat hubungannya dengan negara-negara yang terlibat. Luasnya cakupan kebijakan ini juga akan mampu membuat Tiongkok memiliki status internasionalnya sebagai negara yang besar.

2.1.6 Kerjasama Internasional

Setiap negara selalu mempunyai kepentingan nasional yang tidak mampu dipenuhi didalam negaranya sendiri, maka itu dibutuhkan konsep kerjasama internasional. Konsepsi dari kepentingan tindakan yang *unilateral* dan kompetitif merupakan isu utama dari kerjasama internasional yang berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh.

Dalam konstelasi hubungan internasional dewasa ini, kerja sama merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara demi menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak dari negara lain. Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara, maka diperlukan adanya suatu kerja sama yang baik dan adanya saling pengertian. Kerja sama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara demi mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam suatu kerjasama internasional terbentuk adanya saling ketergantungan (*interdependensi*) diantara aktor-aktor internasional atau negara tersebut. Berikut adalah bentuk - bentuk dari kerjasama internasional :

a. *Kerjasama Bilateral*

Kerjasama dilakukan antara dua negara. Faktor utama dalam kerjasama bilateral adalah perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerjasama *bilateral* cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. *Kerjasama Regional*

Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. *Kerjasama Multilateral*

Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO, WHO) pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik, 2008: 85-87).

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara - nagara dua dunia. Adapun berbagai bentuk kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita & Yani. 2005:33).

Kerjasama internasional memiliki suatu hubungan internasional dalam melakukan kerjasama tersebut dimana satu negara tidak dapat maju apabila tidak menggunakan negara lain sebagai mitranya, setiap negara dapat saling ketergantungan satu sama lainnya, sehingga dikatakan negara tidak dapat maju tanpa bantuan dari negara lain, dimana hubungan hubungan yang dibangun dalam

kerjasama memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga dapat tercapainya kebutuhan negaranya.

Bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral, dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, salah satunya kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral (Perwita & Yani. 2005: 33).

Isu utama dalam kerjasama internasional dilihat berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani. 2005: 33-34).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

2.2 Kerangka Pemikiran

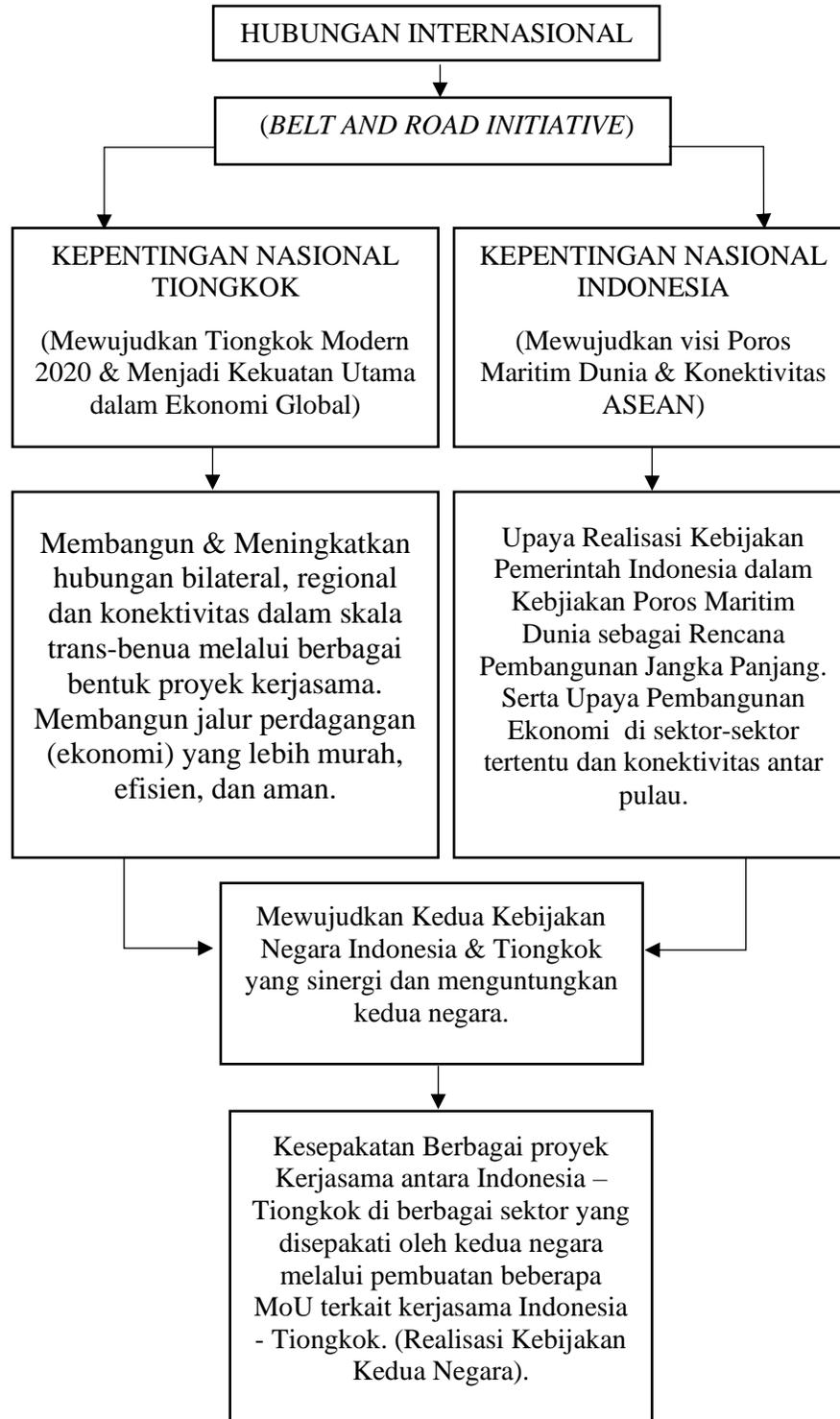
Ambisi *Belt and Road Initiative* Tiongkok menekankan pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan negara tetangga sehingga Tiongkok dapat mengambil keuntungan dari potensi negara-negara tetangga Tiongkok. Tiongkok juga menekankan bahwa negara-negara tetangga harus dapat memperhitungkan kepentingan nasional RRT, yakni target meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan RRT yang modern tahun 2020.

Di sisi lain keinginan Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat sambutan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menginginkan adanya Jalur Sutra Maritim Baru / *New Maritime Silk Road* (NMSR) dalam Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) yang berdasarkan kebangkitan rute perdagangan laut yang dilakukan oleh Zheng He era dinasti Ming pada abad ke-15. Upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai PMD mengharuskan Indonesia memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk mewujudkan keinginan tersebut, dan dalam hal tersebut sangatlah dibuthkan SDA, SDM, dan dana yang tidak sedikit. Dalam Proyek mercusuar *Belt and Road Initiative* yang diluncurkan pada tahun 2013 ini, Tiongkok banyak menanamkan modalnya ke luar negeri, termasuk ke Indonesia dengan membangun jalan, rel kereta api, proyek konstruksi. Di Indonesia sendiri, investasi dari Tiongkok cukup beragam mulai dari investasi seperti smelter dan otomotif, infrastruktur dan kelistrikan serta manufaktur. Tak hanya itu, berbagai prospek kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok di Indonesia semakin meningkat terlihat dari berbagai proyek-

proyek pembangunan di berbagai sektor mulai dari energi, transportasi, hingga perdagangan.

Untuk dapat menganalisa fenomena yang terjadi, dalam penelitian ini digunakan Teori Kepentingan Negara, dimana diharapkan dalam teori ini perubahan / peningkatan yang terjadi terhadap hubungan bilateral dalam bidang Ekonomi & Politik antara Indonesia dengan Tiongkok setelah diterapkannya Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok terhadap Indonesia. Sifat realisme negara Tiongkok untuk menjadi negara dominan baik kawasan Asia, Afrika hingga dunia terasa sangat jelas bentuknya melalui berbagai bentuk kerjasama bilateral & multilateral, forum, maupun juga kesepakatan-kesepakatan tertentu. Melalui berbagai usaha yang dilakukan oleh Tiongkok yang mana berperan sebagai suatu alat untuk mempererat hubungan ekonomi di antara negara-negara yang terlibat hubungan bilateral dengan Tiongkok, salah satunya Indonesia.

Secara lebih rinci, kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut :



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

